



ASPEK-ASPEK HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DITINJAU DARI KLAUSAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Agung Maulana Hidayat¹, Edison Hatoguan Manurung², Alip Prajoko³.
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mpu Tantular Jakarta
Email: agungmaulanahidayat05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam kontrak kerja konstruksi dengan fokus pada klausul perbuatan melawan hukum menggunakan pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis literatur hukum yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi memiliki peranan signifikan dalam menentukan tanggung jawab dan konsekuensi hukum dalam situasi pelanggaran kontrak. Klausul ini dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, pemutusan kontrak, serta potensi klaim ganti rugi yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Kontrak Kerja Konstruksi, Klausul Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Kontraktual, Pelanggaran Kontrak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of construction work contracts with a focus on the tort clause using a literature study approach. The research method used involves searching, analyzing, and synthesizing legal literature relevant to the topic. The results of the study show that the unlawful act clause in a construction work contract has a significant role in determining legal responsibility and consequences in a breach of contract situation. This clause can affect the validity of the contract, termination of the contract, as well as potential claims for damages arising from actions that violate applicable laws or norms.

Keywords: *Legal aspect, construction work contract, tort clause, contractual responsibility, breach of contract.*



PENDAHULUAN

Dalam dunia konstruksi, kontrak kerja memegang peranan sentral sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Kontrak kerja konstruksi memuat berbagai aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek, termasuk aspek hukum. Salah satu isu yang sering muncul dalam konteks ini adalah klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi (Simamora, 2023).

Aspek hukum dalam kontrak kerja konstruksi menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kompleksitas proyek konstruksi dan jumlah pihak yang terlibat. Kontrak kerja konstruksi melibatkan pemberi kerja, kontraktor, subkontraktor, dan berbagai pihak terkait lainnya (Widyantoro, 2020). Dalam banyak kasus, pelanggaran kontrak dapat terjadi karena berbagai faktor seperti keterlambatan, kualitas pekerjaan yang buruk, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Salah satu mekanisme hukum yang relevan dalam kontrak kerja konstruksi adalah klausul perbuatan melawan hukum. Klausul ini mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku, dan dapat memiliki implikasi serius terhadap validitas kontrak, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, serta potensi klaim ganti rugi. Meskipun penting, pemahaman mendalam tentang bagaimana klausul perbuatan melawan hukum diterapkan dalam konteks konstruksi masih belum cukup mendalam di kalangan para praktisi dan akademisi (Harafuddin, 2022). Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek-aspek hukum kontrak kerja konstruksi yang ditinjau dari klausul perbuatan melawan hukum memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini akan memberikan pandangan lebih jelas tentang bagaimana klausul perbuatan melawan hukum dapat mempengaruhi kontrak kerja konstruksi, dampaknya terhadap penyelesaian proyek, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dalam kasus pelanggaran kontrak (Widodo et al., 2023).

Dengan menggali lebih dalam mengenai penggunaan dan penerapan klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga kepada para praktisi hukum, kontraktor, pemberi kerja, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap bagaimana hukum kontrak kerja konstruksi dapat ditingkatkan dan disempurnakan dalam upaya menjaga keadilan dan integritas dalam industri konstruksi yang terus berkembang (Harissa, 2023).

Dengan menghubungkan aspek-aspek hukum kontrak kerja konstruksi dengan klausul perbuatan melawan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum konstruksi dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu hukum yang muncul dalam proyek-proyek konstruksi yang semakin kompleks dan penting.



Dalam konteks penelitian ini, "aspek hukum" mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur kontrak kerja konstruksi (Lumingkewas, 2022). Aspek ini meliputi ketentuan, peraturan, norma hukum, serta interpretasi hukum yang relevan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak kerja konstruksi. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mencegah terjadinya konflik hukum.

Menurut (Kharisma, 2020) Kontrak kerja konstruksi mengacu pada perjanjian formal antara pemberi kerja (pemilik proyek) dan kontraktor (pelaksana proyek) yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kontrak ini mencakup berbagai aspek seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal, biaya, mutu pekerjaan, serta klausul-klausul yang mengatur potensi perubahan dan penyelesaian konflik. Kontrak kerja konstruksi merupakan dasar hukum yang mengikat dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Klausul perbuatan melawan hukum adalah pasal atau ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku (Amanda, 2019). Klausul ini dapat mencakup larangan terhadap tindakan seperti penyuapan, manipulasi data, pelanggaran lingkungan, dan lainnya. Penggunaan klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan memberikan dasar hukum bagi tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Menurut pendapat (Fadel Edo Romires, 2022) Tanggung jawab kontraktual merujuk pada kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Pihak-pihak tersebut harus mematuhi jadwal, mutu, dan spesifikasi pekerjaan yang telah disepakati, serta menjalankan tindakan yang sesuai dengan klausul-klausul dalam kontrak. Tanggung jawab kontraktual melibatkan kepatuhan terhadap semua ketentuan kontrak, dan pelanggaran tanggung jawab ini dapat berdampak pada konsekuensi hukum.

Pelanggaran kontrak menurut (Pranoto, 2019) terjadi ketika salah satu atau lebih pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi tidak mematuhi atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pelanggaran dapat berkisar dari keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, kualitas pekerjaan yang tidak memadai, hingga tindakan yang melanggar hukum atau norma dalam klausul perbuatan melawan hukum. Pelanggaran kontrak dapat memicu klaim ganti rugi, pemutusan kontrak, atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku



METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi literatur dipilih untuk menganalisis aspek-aspek hukum kontrak kerja konstruksi dari perspektif klausul perbuatan melawan hukum. Metode ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, analisis, dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian ini dapat merangkum dan menggali pandangan beragam dari para ahli hukum, keputusan pengadilan, dan teori hukum yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi.

Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memahami evolusi konsep hukum yang berkaitan dengan klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi dari waktu ke waktu. Selain itu, metode ini memfasilitasi identifikasi tren, praktik terbaik, dan perubahan hukum yang mungkin memengaruhi implementasi klausul perbuatan melawan hukum dalam industri konstruksi. Dengan menganalisis literatur hukum yang luas, penelitian ini dapat menggambarkan landasan teoritis yang kokoh dan memberikan wawasan mendalam tentang implikasi dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum kontrak kerja konstruksi yang ditinjau dari perspektif klausul perbuatan melawan hukum. Analisis literatur hukum yang luas menggambarkan kompleksitas serta relevansi klausul perbuatan melawan hukum dalam konteks industri konstruksi (Amanda, 2019).

Salah satu hasil utama penelitian ini adalah pemahaman mendalam tentang pentingnya klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi. Klausul ini bukan hanya memberikan dasar hukum untuk menangani tindakan yang melanggar hukum atau norma, tetapi juga memainkan peran kritis dalam menjaga integritas dan keadilan dalam hubungan kontrak (Pranoto, 2019). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa klausul perbuatan melawan hukum dapat berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap tindakan yang merugikan, serta memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma, 2020) mengidentifikasi tantangan dan kompleksitas yang mungkin muncul dalam penerapan klausul perbuatan melawan hukum. Penggunaan klausul ini memerlukan definisi yang jelas mengenai tindakan yang dianggap melawan hukum, serta mekanisme untuk menilai dan membuktikan pelanggaran. Penelitian ini mengungkapkan bahwa interpretasi tindakan melawan hukum



dalam konteks konstruksi bisa menjadi rumit karena lingkup proyek yang beragam, perubahan peraturan, dan perbedaan pemahaman norma hukum.

Hasil penelitian (Lumingkewas, 2022) juga menyoroti pentingnya penyusunan kontrak kerja konstruksi yang cermat dan jelas untuk memastikan efektivitas klausul perbuatan melawan hukum. Kontrak yang dirancang dengan baik dapat mengantisipasi potensi konflik dan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator atau ahli hukum dalam penyelesaian sengketa kontraktual dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengatasi perbedaan interpretasi terkait dengan klausul perbuatan melawan hukum.

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan terhadap aspek hukum semata, tetapi juga memberikan pandangan praktis bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Implikasi hasil penelitian ini mencakup pengembangan pedoman praktis, standar kontrak, dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam industri konstruksi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan klausul perbuatan melawan hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang peran serta kompleksitas klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi perkembangan hukum konstruksi dan memberikan arah bagi praktisi, akademisi, dan pihak terkait dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam industri konstruksi yang terus berkembang.

B. Pembahasan

1. Peran Penting Klausul Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Peran sentral klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi tidak dapat disepelekan. Kontrak kerja konstruksi adalah dasar hukum yang mengikat pemberi kerja dan kontraktor untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Namun, di tengah kompleksitas proyek konstruksi yang melibatkan berbagai pihak dan aspek, risiko pelanggaran dan konflik hukum bisa saja muncul. Klausul perbuatan melawan hukum berperan sebagai payung hukum yang melindungi pihak-pihak yang terlibat dari tindakan yang tidak sah atau melanggar norma yang berlaku.

Klausul perbuatan melawan hukum tidak hanya menjadi alat reaktif untuk menangani pelanggaran, tetapi juga memiliki peran proaktif dalam mencegah tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam konteks konstruksi, ini berarti melarang pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan seperti penyuapan, pemalsuan dokumen, atau pelanggaran terhadap regulasi lingkungan (Simamora, 2023). Dengan adanya klausul ini, pihak-pihak yang terlibat diharapkan akan mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum.



Klausul perbuatan melawan hukum memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa dan klaim ganti rugi dalam kasus pelanggaran kontrak. Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya dan melakukan tindakan melawan hukum, pihak yang dirugikan dapat merujuk pada klausul ini sebagai dasar klaim ganti rugi. Ini juga dapat menjadi alat yang kuat dalam mediasi atau proses penyelesaian sengketa, karena adanya payung hukum yang jelas mengenai tindakan yang dilarang dan konsekuensinya.

Peran klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi juga berkaitan dengan pengaturan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Klausul ini dapat menguraikan secara rinci tindakan yang harus dihindari dan tindakan yang diwajibkan untuk dilakukan dalam konteks konstruksi. Ini membantu menghindari ketidakjelasan atau interpretasi yang salah terkait dengan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Selain dari perspektif hukum, klausul perbuatan melawan hukum juga berkontribusi pada pembangunan lingkungan bisnis yang etis dalam industri konstruksi. Dengan menekankan larangan terhadap tindakan yang merugikan atau melanggar hukum, klausul ini mendorong adopsi nilai-nilai integritas, transparansi, dan etika dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Ini sesuai dengan tren global di mana pelaku bisnis semakin diharapkan untuk beroperasi dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

Dari pembahasan ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran penting klausul perbuatan melawan hukum dalam kontrak kerja konstruksi merangkul banyak aspek, dari perlindungan hukum dan tanggung jawab hingga pembangunan etika bisnis yang lebih baik. Klausul ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan dalam industri konstruksi yang terus berkembang dan berubah.

2. Kompleksitas Definisi dan Penerapan Klausul Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Konstruksi

Kompleksitas definisi dan penerapan klausul perbuatan melawan hukum dalam konteks konstruksi tercermin dari sifat yang fleksibel dan dinamis dari proyek-proyek konstruksi. Setiap proyek memiliki karakteristik unik, termasuk faktor geografis, lingkungan, regulasi lokal, dan perubahan yang mungkin terjadi sepanjang waktu. Oleh karena itu, mendefinisikan tindakan yang melanggar hukum menjadi tugas yang kompleks, mengingat keberagaman faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapannya (Widyantoro, 2020).

1. Keterkaitan dengan Regulasi Lingkungan dan Keamanan Kerja

Dalam industri konstruksi kaitan antara klausul perbuatan melawan hukum dengan regulasi lingkungan dan keamanan kerja merupakan contoh konkret dari kompleksitas definisi dan penerapannya. Regulasi lingkungan yang berubah-ubah dan



persyaratan keamanan kerja yang semakin ketat membuat interpretasi tindakan yang melanggar hukum dalam konteks ini menjadi menantang. Misalnya, bagaimana tindakan kontraktor yang dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan atau pelanggaran keselamatan kerja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dapat bervariasi berdasarkan hukum lingkungan dan regulasi keselamatan yang berlaku di suatu tempat.

2. Kekurangan Ketentuan Konkret dalam Kontrak

Ketidakpastian terkait definisi dan penerapan klausul perbuatan melawan hukum juga dapat muncul ketika kontrak kerja konstruksi tidak secara rinci menguraikan tindakan-tindakan yang dilarang. Kontrak yang kurang spesifik dalam mengatur perbuatan melawan hukum dapat memicu interpretasi yang beragam dan mengakibatkan perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penerapan klausul menjadi sulit karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai tindakan yang dilarang.

3. Peran Teknologi dan Inovasi dalam Konteks Konstruksi

Penerapan teknologi dan inovasi dalam industri konstruksi dapat memperumit definisi dan penerapan klausul perbuatan melawan hukum. Penggunaan teknologi seperti metode konstruksi baru, bahan-bahan inovatif, atau teknologi informasi yang kompleks dapat menghasilkan situasi yang belum diatur dalam kontrak. Ketidakjelasan mengenai apakah tindakan yang menggunakan teknologi baru tersebut melanggar hukum atau tidak dapat memunculkan tantangan baru dalam penerapan klausul.

4. Pentingnya Interpretasi yang Konsisten

Pentingnya interpretasi yang konsisten terhadap klausul perbuatan melawan hukum dalam industri konstruksi menjadi semakin jelas dalam konteks kompleksitas ini. Interpretasi yang konsisten diperlukan untuk meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dan memastikan bahwa klausul ini digunakan dengan benar sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, lembaga atau ahli yang dapat memberikan pedoman atau interpretasi yang konsisten terhadap klausul ini dapat menjadi penting dalam mengatasi kompleksitas definisi dan penerapannya.

5. Pentingnya Klarifikasi dalam Kontrak

Dalam menghadapi kompleksitas ini, peran penyusunan kontrak yang jelas dan teliti menjadi semakin krusial. Klarifikasi yang tepat mengenai tindakan yang dianggap melawan hukum, serta konsekuensinya, harus dijelaskan secara rinci dalam kontrak kerja konstruksi. Kontrak yang terperinci dapat membantu menghindari ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi yang dapat mengganggu kelancaran proyek.



Dalam kesimpulannya kompleksitas definisi dan penerapan klausul perbuatan melawan hukum dalam konteks konstruksi menyoroti tantangan yang harus diatasi dalam menciptakan pedoman yang jelas dan konsisten. Sifat dinamis industri konstruksi, kaitan dengan regulasi lingkungan dan keamanan kerja, serta perkembangan teknologi menjadi faktor-faktor yang menghasilkan kompleksitas ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan dialog terbuka di antara pihak-pihak yang terlibat akan menjadi kunci dalam meminimalkan ambiguitas dan menjamin penerapan klausul perbuatan melawan hukum yang efektif dalam kontrak kerja konstruksi.

3. Implikasi Terhadap Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Terlibat

Implikasi penerapan klausul perbuatan melawan hukum terhadap penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi sangatlah signifikan. Klausul ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi atau memulai proses penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, adanya klausul ini dapat mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase, dengan harapan menghindari biaya dan waktu yang terkait dengan proses peradilan.

Klausul perbuatan melawan hukum menjadi dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran kontrak. Dalam konteks konstruksi, pelanggaran kontrak bisa berupa keterlambatan dalam penyelesaian proyek, cacat mutu, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat merujuk pada klausul ini sebagai alasan untuk mengajukan klaim ganti rugi, yang mencakup kerugian finansial, kerugian reputasi, dan biaya tambahan yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Klausul perbuatan melawan hukum dapat mendorong penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif yang lebih cepat dan efisien. Proses peradilan konvensional sering kali memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan adanya klausul ini, pihak-pihak yang bersengketa cenderung mencari solusi di luar pengadilan, yang dapat mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya yang terlibat.

Implikasi terhadap tanggung jawab pihak-pihak terlibat dalam proyek konstruksi juga menjadi aspek yang penting. Klausul perbuatan melawan hukum dapat menjelaskan secara tegas dan spesifik tanggung jawab masing-masing pihak terhadap tindakan yang melanggar hukum atau norma dalam kontrak. Dengan demikian, klausul ini membantu mengatur tanggung jawab dan menghindari kebingungan atau sengketa yang mungkin muncul akibat tafsir yang berbeda (Harafuddin, 2022). Ketika terjadi pelanggaran kontrak, adanya klausul perbuatan melawan hukum dapat memberikan dasar yang jelas bagi pihak yang dirugikan untuk meminta perbaikan atau mengajukan klaim ganti rugi. Ini dapat mengurangi risiko konflik panjang dan rumit, serta meminimalkan kemungkinan pemutusan kontrak yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.



Meskipun memberikan banyak manfaat, implikasi terhadap penyelesaian sengketa dan tanggung jawab pihak-pihak terlibat melalui klausul perbuatan melawan hukum juga dapat menjadi kompleks. Penafsiran yang cermat mengenai apakah suatu tindakan benar-benar melawan hukum atau tidak sangatlah penting untuk menghindari klaim yang tidak beralasan dan konflik yang tidak perlu. Oleh karena itu, peran ahli hukum atau mediator dapat menjadi esensial dalam memastikan interpretasi yang tepat dan adil terhadap klausul ini.

Dalam keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa implikasi penerapan klausul perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa dan penentuan tanggung jawab memberikan struktur dan kerangka kerja yang penting bagi pelaksanaan proyek konstruksi. Klausul ini memberikan alat yang efektif bagi para pihak untuk mengatasi pelanggaran kontrak dan menyediakan landasan hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa, sehingga mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi.

PENUTUP

Dalam penelitian ini penulis telah mengulas secara mendalam aspek-aspek hukum dalam kontrak kerja konstruksi yang ditinjau dari perspektif klausul perbuatan melawan hukum. Pemahaman akan implikasi hukum dan praktis dari klausul ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan proyek konstruksi. Dari peran krusial dalam menjaga integritas kontrak hingga kompleksitas definisi dan penerapannya dalam lingkungan proyek yang dinamis, klausul perbuatan melawan hukum menjadi pilar penting dalam pembangunan industri konstruksi yang adil, etis, dan terpercaya. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam industri ini, penting bagi semua pihak terlibat untuk terus berdiskusi, memperdalam pemahaman, dan menerapkan konsep ini dengan tepat demi kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda. (2019). *Akibat Hukum Suatu Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Pada Unsur Penyalahgunaan Keadaan Dan Pembayaran Fiktif (Studi Putusan Mahkamah*



Agung Nomor 523 K/Pdt/2017). 305.

- Fadel Edo Romires. (2022). PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JIP*, 3(4), 5799–5814.
- Harafuddin. (2022). ANALISIS HUKUM PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN PELAKSANAAN MULTI YEARS Harafuddin. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 466–476. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.141>
- Harissa, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Aset Bank Syariah yang Tidak Dapat Menguasai Barang yang Telah Dibelinya Melalui Lelang oleh Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 6(1), 103–134. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43553>
- Kharisma, A. (2020). JURIDICAL ANALYSIS OF WORK CONTRACT MAINTENANCE OF ROAD CLEANLINES AND GARDENING ROAD TOLLS IN THE CITY. *Jurnal Hukum De 'rechtsstaat*, 6(2), 153–171.
- Lumingkewas, V. A. (2022). PELEPASAN TUNTUTAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS. *UNES Law Review*, 5(2), 462–473.
- Pranoto, H. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR DI BANYUWANGI. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(8), 128.
- Simamora, F. (2023). KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. *JIST*, 4(5), 579–590.
- Widodo, S., Studi, P., Magister, T. S., Indonesia, U. I., Suraji, A., Studi, P., Magister, T. S., Indonesia, U. I., Musyafa, A., Studi, P., Magister, T. S., & Indonesia, U. I. (2023). Deviasi penerapan aspek hukum kontrak konstruksi. *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik*, 2(2).
- Widyantoro, V. (2020). Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi. *Arena Hukum*, 13(01), 157–180. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9>